



SKRIPSI

Judul:

Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum
Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan Umum

Disusun oleh:

AISYA AVRYLIA ELSKAN WILDE
NIM. 205200169

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PERUBAHAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM
PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PERKARA
PIDANA PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gerlar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Aisya Avrylia Elskan Wilde
NIM : 205200169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

Pengesahan

Nama : AISYA AVRYLIA ELSKAN WILDE
NIM : 205200169
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan Umum
Title : Changes in the Authority of Law Enforcement in General Elections Regarding the Handling of Electoral Criminal Cases

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : AISYA AVRYLIA ELSKAN WILDE
NIM : 205200169
Program Studi : HUKUM
Judul : Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan
Umum Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan
Umum

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

- (A) Nama : Aisya Avrylia Elscan Wilde
Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan
- (B) Judul : Umum
- (C) Halaman : XVI + 75 + 2024
- (D) Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum, Kewenangan
- (E) Isi
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini terbukti dengan adanya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila ke-4 Pancasila. Pelaksanaan dari Pasal dan sila tersebut adalah dengan adanya Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana dalam pasal ini mengatur mengenai Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kelancaran dan kesuksesan dari jalannya Pemilihan Umum tersebut harus terciptakan. Pemilihan Umum di Indonesia harus di jalankan dengan menjunjung tinggi asas Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBERJURDIL). Didalam Pemilihan Umum ini masyarakat Indonesia dapat memilih pemerintahannya itu sendiri, termasuk dengan perwakilan-perwakilan suara masyarakat. Secara realistis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang melibatkan milyaran masyarakat pastinya akan susah dan kesalahan atau pelanggaran sudah dipastikan akan terjadi. salah satu pelanggaran yang dapat terjadi dalam sebuah Pemilihan Umum adalah pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum. Proses yang digunakan sekarang untuk menangani perkara seperti itu mempunyai waktu yang sangat singkat dengan proses yang amat rumit dan dengan adanya banyak pihak dari berbagai macam bidang yang terlibat, menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dan juga pandangan. Hal ini cenderung menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun tidak tersampainya keadilan bagi para pihak yang merasa telah dirugikan oleh tindakan suatu pihak. Hal ini bertentangan dengan Teori Efektivitas Hukum dan juga Teori Keadilan. Tidak melupakan juga keterlambatan dalam penyampaian keadilan adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan, hal ini : bertentangan dengan sifat hukum yang seharusnya

bersifat *Lex nemini operator iniquum, nemini facit injuriam* atau hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Oleh karena itu perubahan terhadap proses penanganan perkara pidana Pemilihan Umum harus diperbaiki yang dimana dalam perbaikan itu tidak melupakan Teori Kewenangan.

- (F) Acuan : 10 (2008-2024)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.
- (H) Penulis : Aisya Avrylia Elskan Wilde

ABSTRACT

- (A) *Name* : Aisya Avrylia Elskan Wilde
- (B) *Title* : *Changes in the Authority of General Election Law Enforcement in Handling General Election Criminal Cases*
- (C) *Page* : XVI + 75 + 2024
- (D) *Keyword* : *Democracy, General Elections, Authority*
- (E) *Isi* : *Indonesia is one of the countries that adheres to a democratic system, this is evidenced by the existence of Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the 4th Precept of Pancasila. The implementation of these Articles and precepts is with the existence of Article 22E of the 1945 State Law of the Republic of Indonesia which in this article regulates General Elections. Therefore, the smoothness and success of the General Election must be achieved. General elections in Indonesia must be carried out by upholding the principles of Direct, Free, Secret, Honest, and Fair (LUBERJURDIL). In this General Election, the Indonesian people can choose their own government, including with representatives of the people's voices. Realistically, the implementation of General Elections involving billions of people will certainly be difficult and mistakes or violations will certainly occur. One of the violations that can occur in a General Election is a violation of the General Election criminal crime. The process used today to handle such cases has a very short time with a very complicated process and with the presence of many parties from various fields involved, causing differences of understanding and views. This tends to cause delays or non-delivery of justice for parties who feel that they have been harmed by the actions of a party. This is contrary to the Theory of Legal Effectiveness and also the Theory of Justice. Not forgetting that the delay in delivering justice is a form of injustice, this is contrary to the nature of the law that should be *Lex nemin operator iniquum, neminini facit injuriam* or the law does not give injustice to anyone and does not do wrong to anyone. Therefore, changes to the process of handling general election criminal cases must be corrected, which in the improvement does not forget the Theory of Authority.*

- (F) *Acuan* : 10 (2008-2024)
- (G) *Pembimbing* : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.
- (H) *Penulis* : Aisya Avrylia Elskan Wilde

Pernyataan

Nama : AISYA AVRYLIA ELSKAN WILDE
NIM : 205200169
Program Studi : HUKUM
Judul : Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025

Yang menyatakan



AISYA AVRYLIA ELSKAN WILDE
NIM. 205200169

KATA PENGHANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah, Anugerah dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERUBAHAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini penulis sadari masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis perhatikan guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkah dan Rahmat-Nya kepada penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
7. Bapak Benny Sabdo, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Pimpinan) yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Reki Putera Jaya, S.H. selaku Anggota Bawaslu DKI Jakarta (Pimpinan) yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Penguji Seminar Proposal;
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Adrial Wilde, S.E., dan Agustiani Tio Fridelina Sitorus, S.E., M.M., yang telah membantu dan mendukung penulis selama menyelesaikan studi maupun penyelesaian skripsi ini;
12. Kedua saudara kandung tercinta, Muhammad Ryan Firdaus Wilde dan Alexandrya Septina Ramadhini Wilde yang telah membantu dan mendukung penulis selama menyelesaikan studi maupun penyelesaian skripsi ini;
13. Vannesa Adistya Wildan selaku penyemangat bagi penulis dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Seluruh teman-teman tercinta dan pasangan penulis yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu, Tiffany Dumais, Evelyn Ivanca, Philipus Vardiman, S.Kom., Grenaldus Calvino Vigopang, Jack, Brian Jeremy Modami, Khibran Nadhir, Naufal Tunggul Alam, Jonathan Tanuwijaya, Ewaprilyandi Fahmi Syahputra, S.H., dan Baptista Veranius Mudiranto, S.H.;

15. Keluarga Besar Wacana Mahasiswa Ksatria Tarumanagara dan Badan Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berorganisasi selama penulis aktif di dalamnya;
16. Teman-teman seperbimbingan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang telah menjadi rekan seperbimbingan dan berjuang bersama untuk bisa menyelesaikan skripsi ini; dan
17. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis, Aparat Penegak Hukum Pemilihan Umum, maupun untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Jakarta, 01 Juni 2024

Aisya Avrylia Elskan Wilde

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	II
Lembar Pengesahan.....	III
Lembar Persetujuan	IV
Abstrak.....	V
Lembar Pernyataan	IX
Kata Pengantar	X
Daftar Isi	XIII
Daftar Gambar.....	XV
Daftar Singkatan.....	XVI
Daftar Lampiran.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. Teori Efektivitas Hukum.....	20
B. Teori Keadilan	21
C. Teori Kewenangan	22
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	23

A. Kajian Dugaan Pelanggaran No. 004/Reg/LP/PL/Kota/12.05 /III/2024	23
B. Hasil Wawancara	38
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	42
A. Mengapa Harus Terjadi Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum dalam Penanganan Perkara Pidana Pemilihan Umum	42
B. Proses Penanganan Perkara Pidana Pemilihan Umum dengan Diubahnya Wewenang Tersebut	60
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Gambar 1.2 Bagan Proses Penanganan Tindak Pidana UU No. 1 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Gambar 1.3 Bagan Proses Penanganan Tindak Pidana Hasil Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UU	adalah Undang-Undang
KPU	adalah Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Gakkumdu	adalah Sentra Penegak Hukum Terpadu
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Letter of Acceptance Jurnal
Lampiran 8	: Surat Permohonan dan Keterangan Wawancara